

Implementasi “Pancasila Perencanaan Kota” untuk mencapai Tujuan MDGs

Yuli Tirtariandi El Anshori
FISIP Universitas Terbuka
e-mail: yulitirta@ut.ac.id

ABSTRAK

Kawasan perkotaan di Indonesia seperti Jakarta saat ini identik dengan hal-hal seperti kumuh, tidak aman, dihuni oleh banyak pengangguran dan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, serta tidak pro terhadap kesetaraan gender. Kemudian berbagai kerusakan lingkungan menjadi hal yang biasa terjadi di daerah urban. Kesemuanya ini menjadikan upaya pencapaian tujuan *Millennium Development Goals (MDGs)* masih membutuhkan perjuangan panjang.

Berbagai permasalahan perkotaan yang terkait dengan MDGs seperti kemiskinan, kelestarian lingkungan hidup, penyakit menular, dan kemudahan akses pendidikan dasar adalah problema yang membutuhkan strategi terpadu untuk menuntaskannya. Pembangunan kawasan perkotaan yang dilakukan secara humanis, demokratis dan partisipatif merupakan sebuah hal yang mutlak ditempuh. Dengan demikian pembangunan tersebut benar-benar tepat sasaran dan menyentuh akar masalah secara langsung.

Upaya mencapai tujuan MDGs khususnya di wilayah perkotaan dapat dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek. Artikel ini akan mengkaji bagaimana penerapan 5 pilar perencanaan kota secara baik, komprehensif dan integral akan mempermudah jalan tercapainya cita-cita dalam MDGs pada tahun 2015 nanti. Kelima pilar tersebut adalah Wisma (perumahan), Karya (lapangan kerja), Marga (jaringan jalan), Suka (rekreasi, taman), dan Prasarana (air bersih, listrik, drainase, persampahan). Kelima unsur yang dikenal dengan istilah “Pancasila Perencanaan Kota” ini akan terkait erat dengan berbagai permasalahan seperti kemiskinan. Kelangkaan lapangan kerja di perkotaan turut menyumbang banyaknya jumlah kaum miskin kota. Hasil kajian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran bahwa integrasi 5 pilar tersebut akan mempermudah jalan mengatasi permasalahan perkotaan yang terkait dengan MDGs.

Kata kunci: *Implementasi, Perencanaan Kota, MDGs*

I. Pendahuluan

Berbagai permasalahan masih melanda wilayah perkotaan di Indonesia. Masalah seperti permukiman padat dan kumuh, pengemis dan gelandangan, pengangguran, kurangnya ruang terbuka atau ruang hijau, banjir, pasokan air bersih yang tidak mencukupi, infrastruktur jalan yang tidak mampu mengatasi kemacetan, dan beragam masalah lainnya. Semua masalah ini membutuhkan solusi yang tepat. Hanya saja untuk menuntaskan semua masalah klasik tersebut tidaklah mudah. Dibutuhkan penanganan yang integral antar berbagai pemerintah daerah maupun koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Disamping itu, dibutuhkan sebuah perencanaan yang tepat agar masalah-masalah di perkotaan bisa diselesaikan dengan sistematis, efektif dan efisien. Kebijakan penataan kota yang tepat akan menghasilkan skema penyelesaian masalah yang tidak sekedar penanganan sesaat dan hanya *lips service*.

Salah satu kiat untuk mengatasi berbagai permasalahan perkotaan adalah dengan menerapkan “Pancasila Perencanaan Kota”. Lima prinsip (Pancasila) perencanaan kota tersebut adalah Wisma (perumahan), Karya (lapangan kerja), Marga (jaringan jalan), Suka (rekreasi, taman), dan Prasarana (air bersih, listrik, drainase, persampahan). Kelima unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam melakukan perencanaan perkotaan yang baik. Adanya perencanaan yang baik maka akan menghasilkan sebuah tata perkotaan yang baik pula. Tidak hanya itu berbagai permasalahan perkotaan akan dapat teratasi sedikit demi sedikit. Salah satu sila misalnya jaringan jalan, jika tidak direncanakan dengan baik maka akan berpengaruh besar terhadap masalah transportasi. Terhambatnya masalah transportasi maka akan berpengaruh besar terhadap aspek lainnya. Contoh nyata adalah bagaimana peliknya memecahkan masalah transportasi di kota besar di Jakarta. Kota ini pada siang hari jumlah penduduknya mencapai 12 juta orang yang terdiri dari kaum komuter maupun penduduk yang berdomisili di Jakarta sendiri. Kemacetan terjadi dimana-mana. Jaringan jalan yang ada tidak mampu menampung membludaknya kendaraan. Hal ini seyogyanya dapat diantisipasi sejak awal jika pembangunan jaringan jalan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan kota yang baik juga.

Implementasi Pancasila Perencanaan Kota dengan integral hanyalah merupakan salah satu cara untuk mengatasi berbagai permasalahan di daerah urban. Minimnya jumlah permasalahan di perkotaan akan mendukung pencapaian beberapa tujuan dari 8 tujuan MDGs pada tahun 2015. Artikel ini akan mengkaji bagaimana 5 pilar yang disebutkan di atas merupakan satu kesatuan prinsip yang dapat mendorong percepatan pencapaian MDGs di Indonesia jika diterapkan secara baik dan tepat.

II. Tinjauan Teoretik

a) Perencanaan

Perencanaan sebagai sebuah fungsi manajemen merupakan proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. George Terry (dalam Riyadi dan Bratakusumah, 2003) menyatakan bahwa perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Masih tentang konsep perencanaan, Conyers dan Hills mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proses terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang akan datang.

Mengenai perencanaan ini, LAN-DSE (1999) menyatakan terdapat beberapa unsur di dalamnya yaitu:

- 1) perencanaan berarti memilih atau membuat pilihan
- 2) perencanaan berarti pengalokasian sumber daya, meliputi pemanfaatan sumber daya alam, manusia, dan anggaran.
- 3) Perencanaan juga berarti sebuah orientasi atau alat untuk mencapai tujuan tertentu misalnya motif ekonomi, sosial politik, dan lainnya.
- 4) Perencanaan berhubungan dengan masa mendatang
- 5) Perencanaan adalah kegiatan yang berkesinambungan

Pengertian lainnya dari perencanaan dapat dikutip dari PP 8 tahun 2008. Dalam PP tersebut Pasal 1 dinyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dari berbagai definsi dan unsur-unsur perencanaan di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah perencanaan pada intinya adalah proses membuat alternatif kebijakan berdasarkan asumsi dan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan kota sebagai bagian dari perencanaan tata ruang wilayah adalah suatu proses untuk menentukan struktur dan pola tata ruang kota yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kota.

Pendekatan Perencanaan Komprehensif

Beberapa negara berkembang termasuk Indonesia masih menggunakan pendekatan perencanaan ini dalam melaksanakan perencanaan kota. Dalam implementasinya perencanaan ini bersifat komprehensif (seluruh wilayah dan semua kegiatan fungsional), umum, jangka panjang, dan berkaitan dengan persoalan sistem. Model perencanaan ini menghasilkan produk rencana induk (*masterplan*) ataupun rencana umum (Kustiwan, 2007). Dalam prakteknya perencanaan kota yang menggunakan pendekatan ini mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya:

- 1) Kurang memperhatikan implikasi pembiayaan
- 2) Kurangnya koordinasi dengan strategi sektoral seperti sosial ekonomi
- 3) Adanya ketidakpastian hubungan perencanaan tata ruang dengan ekonomi
- 4) kurangnya partisipasi masyarakat
- 5) Kelemahan kelembagaan di sektor pemerintah

Selain kelemahan di atas, menurut Devas (1993) beberapa kelemahan lainnya adalah isu spasial dan penggunaan lahan lebih dominan daripada isu sosial, ekonomi dan lingkungan, adanya pandangan negatif dan pembatasan terhadap pertumbuhan kota, proyeksi investasi publik yang dibutuhkan cenderung tidak realistis apabila dikaitkan dengan sumber daya yang tersedia, adanya batas yang tegas antara penyusunan rencana dengan proses pengambilan keputusan dimana seharusnya kedua unsur tersebut saling terkait, serta tidak ada mekanisme pengendalian yang efektif yang diikuti dengan kegagalan birokrasi perizinan.

b) Kota

Dalam PP 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan bahwa kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Sedangkan P2KTPW-BPPT (2002) menyatakan bahwa kota adalah bagian dari sebuah sistem wilayah yang lebih besar karena sebuah kota tidak berdiri sendiri. Kota berperan sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi dan pusat permukiman. Secara fungsional kota mempunyai dua fungsi yaitu: *pertama*, secara internal melayani kegiatan sosial ekonomi bagi penduduknya (menyediakan lapangan kerja, prasarana dan sarana kota). *Kedua*, dalam lingkup eksternal maka sebuah kota berfungsi melayani wilayah sekitarnya. Dalam konteks kaitan perencanaan kota dengan pencapaian tujuan MDGs, maka fungsi kota yang menonjol

adalah bagaimana sebuah kota dapat menjalankan aktivitas sosial ekonomi misalnya mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi penduduknya.

III. Pembahasan

Beragam permasalahan yang mendera Indonesia belakangan ini banyak terjadi di daerah perkotaan, meskipun jika dikaji secara makro masalah tersebut merupakan kombinasi antara problema perkotaan dan perdesaan. Misalnya masalah kemiskinan. Jumlah masyarakat miskin saat ini mencapai 29,13 juta jiwa (data BPS per Maret 2012).

Dengan menggunakan beberapa konsep dalam kajian teoretis di atas sebagai pisau analisis, maka beberapa hal yang dapat diterapkan dari Pancasila Perencanaan Kota untuk mendukung pencapaian tujuan MDGs adalah sebagai berikut:

1) Sila Karya (Lapangan Kerja)

Upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan millennium sudah banyak dilakukan melalui berbagai kebijakan dalam rencana pembangunan jangka panjang, menengah maupun pendek. Misalnya dalam hal menanggulangi kemiskinan dan kelaparan maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya khususnya di kawasan perkotaan. Sulitnya mencari lapangan kerja di kota membuat banyak terjadi kasus kemiskinan dan kelaparan. Jumlah kaum miskin kota semakin hari semakin bertambah. Di Jakarta jumlah penduduk miskin hingga Maret 2012 sebesar 363,20 ribu orang (<http://jakarta.bps.go.id/>, didownload 7 Juli 2012). Masalah kemiskinan ini jika tidak ditanggulangi dengan baik maka akan menjadi pemicu permasalahan lainnya seperti tindak kejahatan, pengangguran, dan berbagai penyakit masyarakat lainnya.

Pilar lapangan kerja dalam sebuah perencanaan kota perlu diimplementasikan dengan baik. Salah satu solusi instan adalah menyediakan berbagai industri padat karya meskipun jumlahnya masih tidak sebanding dengan kebutuhan lapangan kerja. Salah satu langkah lainnya adalah mendorong tumbuhnya kegiatan kewirausahaan. Tentu saja ini harus didukung oleh *stakeholder* terkait misalnya kalangan perbankan dalam hal penyediaan modal. Begitu pula perlunya menggairahkan kembali peran koperasi sebagai salah satu soko guru perekonomian Indonesia. Hingga tahun 2015 mendatang, diasumsikan bahwa jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 247,6 juta jiwa dimana sekitar 60,2 % berdiam di Pulau Jawa. Fakta ini akan menjadikan masalah penyediaan lapangan kerja perlu direncanakan lebih matang. Kegagalan dalam perencanaan komprehensif yang kurang memperhatikan keterkaitan sektoral antara aspek spasial dengan aspek ekonomi jangan sampai terulang lagi. Pembangunan fisik hendaknya diselaraskan dengan nilai tambah ekonomi yang

dinikmati masyarakat. Misalnya perlu dipikirkan ulang manakah yang lebih bermanfaat, apakah terus membangun pusat perbelanjaan modern (mal) atau merenovasi dan menata ulang pasar tradisional yang ada. Kemudian apakah masih perlu memberikan izin pembangunan minimarket hingga ke kampung-kampung dan membunuh potensi ekonomi rakyat kecil yang sudah ada seperti toko kelontong atau kios-kios yang sudah ada.

Laporan pencapaian tujuan MDGs yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2010 mengklaim bahwa bahwa penduduk yang memiliki penghasilan kurang dari 1 USD per hari sebagai indikator garis kemiskinan semakin hari semakin berkurang jumlahnya. Pada tahun 2014 nanti ditargetkan jumlah penduduk miskin di Indonesia hanyalah 8-10 % dari total jumlah penduduk. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan ini adalah memperluas kesempatan kerja, meningkatkan infrastruktur pendukung, dan memperkuat sektor pertanian. Mengenai masalah kesempatan kerja, hingga tahun 2009 rasio kesempatan kerja terhadap penduduk yang berusia 15 tahun ke atas mencapai 62%. Rasio ini jika semakin tinggi menunjukkan besarnya jumlah atau semakin tingginya angkatan kerja yang mendapatkan pekerjaan.

Masalah penyediaan lapangan kerja menjadi semakin penting karena secara fungsional kota mempunyai fungsi melayani kegiatan sosial ekonomi bagi penduduknya diantaranya menyediakan lapangan kerja. Tetapi berbagai kendala dialami oleh kota dalam menjalankan fungsinya tersebut. Seperti dikatakan Devas (1993), kelemahan itu antara lain timbul karena isu spasial dan penggunaan lahan lebih dominan daripada isu sosial dan ekonomi. Hal ini terlihat bagaimana perencanaan pengembangan kota yang dilakukan terpaku kepada pembangunan bersifat fisik terhadap lahan yang ada. Alih fungsi lahan seringkali terjadi tanpa memikirkan dampak sosial ekonomi yang terjadi. Penggunaan lahan misalnya untuk pembangunan perumahan memang berdampak ekonomi tetapi tidak untuk jangka panjang. Berbeda halnya jika pemanfaatan lahan dipergunakan untuk industri yang bersifat padat karya dan eksis untuk jangka panjang. Lebih mengedepannya isu spasial menjadi penyumbang semakin banyaknya pengangguran di perkotaan yang pada akhirnya berdampak terhadap tingkat kemiskinan.

Rentetan permasalahan yang timbul akibat kelangkaan lapangan kerja juga berdampak kepada kemampuan untuk mengakses pendidikan dasar. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin sulit untuk bisa menuntaskan pendidikan meskipun sudah digulirkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh pemerintah. Data menunjukkan bahwa hingga tahun 2008 proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan pendidikan sekolah dasar baru mencapai 93,5 %. Sisa sekitar 6,5 % diperkirakan berasal dari keluarga

yang kurang mampu dimana mereka terpaksa putus sekolah dan bekerja membantu orangtuanya.

Masalah lapangan pekerjaan ini juga berdampak terhadap masalah kesetaraan gender. Kaum perempuan mengalami kesulitan untuk bersaing dengan kaum laki-laki dalam memperoleh pekerjaan yang terbatas jumlahnya. Hal ini terbukti dari data Bappenas tahun 2010 bahwa kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian hingga tahun 2009 hanya mencapai 33,45%. Hal ini tentunya memerlukan perencanaan yang lebih baik lagi dari lembaga pemerintah misalnya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan lapangan kerja sendiri. Tidak bisa dipungkiri seberapa besarnya pun lapangan kerja yang diciptakan pemerintah tidak akan mampu menampung lonjakan angkatan kerja baru setiap tahunnya. Hingga tahun 2010 masih ada sekitar 7,41% penduduk RI yang dikategorikan sebagai pengangguran terbuka.

2) Sila Wisma (Perumahan)

Masalah perumahan juga merupakan masalah kronis di perkotaan. Meskipun berbagai terobosan coba dilakukan misalnya dengan membangun rumah susun dan proyek rumah murah, tetapi masih saja dijumpai banyaknya permukiman padat dan kumuh. Maraknya permukiman kumuh di kota tidak bisa dilepaskan sebagai akibat ketidakmampuan masyarakat membangun rumah yang layak huni dan sehat. Kendala ekonomi menjadi penyebab utama. Hingga tahun 2009 diperkirakan terdapat 12,9% rumah tangga kumuh di perkotaan.

Penataan masalah perumahan yang tidak baik akan berdampak negatif terhadap upaya pencapaian tujuan MDGs. Misalnya tujuan MDGs ke-7 yaitu memastikan kelestarian lingkungan hidup. Dapat dipastikan bahwa kesulitan lahan untuk membangun tempat tinggal membuat banyak warga kota mengorbankan lahan hijau, daerah resapan air, dan sempadan sungai untuk dijadikan lokasi rumah. Secara teoretis seperti dikatakan Devas, ini menunjukkan tidak adanya mekanisme pengendalian yang efektif yang diikuti dengan kegagalan birokrasi perizinan. Seharusnya daerah-daerah seperti daerah resapan air dan sempadan sungai terlarang untuk dijadikan lokasi tempat tinggal. Tetapi kenyataannya, banyak daerah resapan air yang berubah fungsi menjadi perumahan. Kemudian sempadan sungai menjadi permukiman. Seharusnya birokrasi yang menangani masalah perizinan dapat bersikap tegas untuk menolak atau bahkan menindak pihak-pihak yang melanggar izin pembangunan tempat tinggal. Nampaknya perlu dipikirkan adanya mekanisme pengendalian yang lebih efektif.

Pembangunan tempat tinggal yang tidak terkontrol khususnya permukiman liar dan kumuh, mempengaruhi tingkat aksesibilitas penduduknya terhadap air bersih yang layak minum. Hingga tahun 2009 lalu, proporsi rumah tangga di perkotaan dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak baru mencapai 49,82%. Kemudian proporsi rumah tangga di perkotaan dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi yang layak mencapai 69,51% pada tahun 2009.

Masih belum tercapainya target dari beberapa indikator tersebut secara teoretis dikarenakan kelemahan kelembagaan pemerintah khususnya lembaga yang membidangi masalah perizinan. Kemudian, proyeksi investasi publik yang dibutuhkan cenderung tidak realistis apabila dikaitkan dengan sumber daya yang tersedia. Misalnya untuk menanamkan investasi di bidang pengadaan air bersih perkotaan mengalami berbagai kendala. Tidak hanya dari segi pendanaan, tetapi juga dari sumber air baku. Hal tersebut menyebabkan akses masyarakat perkotaan terhadap air minum yang layak masih belum maksimal.

3) Sila Marga (Jaringan Jalan)

Jaringan jalan yang baik akan berpengaruh terhadap kemudahan untuk mengakses tempat kerja, pergerakan barang dan jasa yang menggerakkan roda perekonomian, mobilitas anak sekolah, serta kemudahan akses sentra pelayanan kesehatan (untuk meningkatkan kesehatan ibu). Kemudahan mengakses tempat kerja akan menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bermuara pada berkurangnya jumlah masyarakat miskin. Infrastruktur jalan yang baik tidak hanya antar kota tetapi juga penghubung antara desa dan kota, akan mempermudah aktivitas ekonomi yang semuanya berdampak positif terhadap pencapaian MDGs.

4) Sila Suka (Rekreasi dan Taman)

Perencanaan pembangunan tempat Rekreasi dan Taman yang baik akan berdampak positif terhadap kelestarian lingkungan hidup, keterjagaan daerah resapan air, kelestarian sumber air bersih, serta ketersediaan ruang hijau/publik. Penggunaan lahan secara tepat guna dapat menunjang pencapaian MDGs. Misalnya, menjadikan daerah resapan air seperti danau atau Situ di perkotaan sebagai area wisata (rekreasi), berdampak positif tidak hanya sebagai tempat bersantai bagi warga kota tetapi juga ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kemudian menciptakan taman kota berdampak positif terhadap ketersediaan ruang publik sekaligus menghindari ruang hijau berubah fungsi menjadi bangunan fisik. Perencanaan sektor ini membutuhkan sinergi dengan rencana pembangunan perkotaan

yakni masalah tata ruang. Kebijakan yang diterapkan pemerintah harus konsisten dalam pemilahan kawasan yang diperuntukkan pengembangan kota maupun kawasan hijau. Patut untuk dihindari munculnya pemisahan yang tegas antara penyusunan rencana dengan proses pengambilan keputusan. Selayaknya aspek politis maupun ekonomi tidak masuk dalam proses pengambilan keputusan. Jika itu terjadi maka perencanaan yang sudah dibuat sejak awal akan gagal untuk diimplementasikan.

5) Sila Prasarana (air bersih, listrik, drainase, persampahan)

Perencanaan pembangunan prasarana meliputi air bersih, listrik, drainase, dan persampahan yang baik akan membantu mencapai tujuan MDGs. Misalnya adanya suplai air bersih yang cukup akan meningkatkan kualitas kesehatan ibu, menurunkan angka kematian anak, dan membantu memastikan kelestarian lingkungan hidup. Tidak hanya itu, adanya pasokan listrik yang cukup akan membantu menanggulangi kemiskinan karena mendorong tumbuhnya lapangan kerja seperti industri rumah tangga dan usaha kecil menengah (UKM) , serta berdampak positif terhadap kemajuan tingkat pendidikan. Kemudian drainase dan pengelolaan persampahan yang rapi juga membantu kelestarian lingkungan hidup. Masalah drainase di perkotaan misalnya di Jakarta merupakan salah satu penyumbang terjadinya banjir tahunan di ibukota. Begitu pula masalah sampah menjadi hal yang menyulitkan beberapa kota di Jabodetabek terkait dengan masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) , seperti yang pernah dialami Kota Tangerang Selatan.

III. Kesimpulan

Implementasi “Pancasila Perencanaan Kota” secara tepat, baik, dan sinergis akan menunjang pencapaian beberapa tujuan MDGs. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya. Mulai dari aspek sumber daya hingga inkonsistensi kebijakan yang terkadang dipengaruhi oleh aspek politis dan kepentingan ekonomi, serta kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Ditambah faktor lainnya yakni kebijakan perencanaan kota dengan pendekatan komprehensif masih didominasi oleh sudut pandang spasial dan penggunaan lahan serta mengabaikan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jika lima pilar perencanaan kota diterapkan dengan baik dan konsisten maka upaya mencapai tujuan MDGs pada tahun 2015 akan lebih mudah dilakukan. Bahkan cita-cita menciptakan masyarakat madani sebagai masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya akan mudah tercapai. Dalam masyarakat madani ini

pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya, misalnya melalui program seperti PNPM Mandiri yang dilaksanakan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Meskipun diberikan peluang yang seluas-luasnya, tetap dibutuhkan adanya mekanisme pengendalian yang efektif agar perencanaan yang telah dibuat sejak awal tidak melenceng ketika sampai pada tahap implementasi kebijakan.

Referensi

Devas, Nick and Rakodi, Carole (eds.). 1993. *Managing Fast Growing Cities: New Approach to Urban Planning and Management in Developing World*. New York: Longman Scientific & Technical

Kustiwan, Iwan. 2007. *Perencanaan Kota*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka:

LAN RI-DSE Jerman. 1999. *Modul Diklat Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: LAN RI

Riyadi & Dedy S Bratakusumah, 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

P2KTPW BPPT. 2002. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah, Kajian Konsep dan Pengembangan*. Jakarta: Penerbit P2KTPW BPPT

Dokumen Lain

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2010. *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia 2010*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

PP 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Website

<http://jakarta.bps.go.id/>, didownload 7 Juli 2012 pukul 14.00 WIB